

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN SOSIAL

REKOMENDASI BANTUAN PERMAKAMAN ANAK PANTI DAN ASRAMA SLB



PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

		Nomor SOP	07.01.04.23
		Tanggal Pembuatan	10 April 2023
		Tanggal Revisi	21 Juni 2023
		Tanggal Efektif	7 Juli 2023
		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR	
		Disahkan Oleh	
			
		Nama SOP	Rekomendasi Bantuan Perumahan Anak Pantil dan Astrama SLB
DASAR HUKUM			
1	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	5	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial		
7	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial		
8	Pemendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah		
9	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelagasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir		
KETERAKAITAN			
1	SOP Penanganan Pengaduan	1	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2	Komputer, Printer, Scanner
3	SOP Survey	3	Jaringan LAN dan koneksi Internet
		4	Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
			Alat Tulis Kantor
PERINGATAN			
		1	BUKU REGISTRASI
		2	DATABASE SISTEM PERIZINAN ROKAN HILIR (SIPRO)
Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah			
1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses			
2 Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan			
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan			
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan			

